

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki potensi sumber daya alam melimpah di berbagai sektor, khususnya pada sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor paling penting sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus menyerap tenaga kerja dalam jumlah terbesar dibandingkan sektor lainnya (Mistiyah et al., 2021). Namun, permasalahan pangan masih terus berulang dari waktu ke waktu. Walaupun Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen beras utama di dunia, kenyataannya hampir setiap tahun dihadapkan pada tantangan pemenuhan kebutuhan pangan. Indonesia berada di urutan keempat sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika (Anandhiya et al., 2023). Pertumbuhan penduduk yang tinggi menjadi hambatan utama bagi sektor pertanian, terutama dalam upaya menyediakan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tanpa memperluas produksi pangan dengan waktu yang cukup, maka terjadi sebuah masalah antara lain kelaparan, kesejahteraan manusia, dan stabilitas ketahanan pangan. Dengan demikian, Indonesia sedang menghadapi masalah serius dalam menjaga ketersediaan pangan untuk semua warganya. Selain itu, Indonesia juga menempati peringkat ke-2 dengan skor indeks kelaparan tertinggi di ASEAN sebesar 17,6 poin menurut laporan Global Hunger Indeks 2023. Angka tersebut dikategorikan pada level serius dan rendahnya tingkat ketahanan pangan. Kondisi tersebut terjadi bukan karena kekurangan ketersediaan pangan, tetapi karena keterbatasan akses terutama pada masyarakat dengan daya beli rendah

(Hadi Mousavi, 2020). Berbagai tantangan pada sektor pertanian khususnya ketahanan pangan selalu terjadi pada negara berkembang salah satunya Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengimplementasikan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dengan target utamanya pada indikator ke-2 “*Zero Hunger*” artinya Mengatasi kelaparan, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan konsumsi gizi, serta mendukung praktik pertanian yang ramah lingkungan. Kelaparan tidak selalu terjadi karena tidak ada pangan, melainkan karena seseorang tidak memiliki hak atau kemampuan ekonomi untuk memperolehnya. Dengan demikian, menunjukkan bahwa meskipun makanan ada di pasaran, keluarga yang kurang mampu masih bisa menghadapi masalah ketahanan pangan.

Ketahanan pangan merupakan situasi di mana kebutuhan pangan untuk suatu area dan individu dapat dipenuhi melalui ketersediaan makanan yang memadai, baik dari segi jumlah maupun mutu. Menurut FAO menyatakan bahwa ketahanan pangan terjadi apabila seluruh masyarakat, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi sesuai kebutuhan hidup aktif dan sehat. Ketahanan pangan tidak hanya sekedar ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup aspek lainnya. Aspek tersebut yaitu ketersediaan pangan (*food availability*), keterjangkauan pangan (*food accessibility*), dan pemanfaatan pangan (*food utilization*). Aspek ketersediaan pangan merupakan dimensi yang memastikan bahwa jumlah pangan yang cukup dapat disediakan bagi seluruh masyarakat secara berkelanjutan. Ketersediaan ini mencakup produksi, cadangan, serta distribusi pangan di tingkat nasional maupun lokal. Selanjutnya, aspek keterjangkauan pangan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan yang telah tersedia, baik dari sisi fisik maupun

ekonomi, sehingga distribusinya dapat menjangkau seluruh kalangan secara efektif dan efisien. Sementara itu, aspek pemanfaatan pangan menekankan pentingnya mutu dan kandungan gizi dari pangan yang dikonsumsi, guna menjamin bahwa pangan tersebut memberikan manfaat optimal bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Ketiga aspek tersebut saling berhubungan dalam mewujudkan ketahanan pangan jangka panjang dan saling memiliki indikator masing-masing yang mempengaruhi. Apabila ada satu aspek yang terganggu akan mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap ketahanan pangan. Gangguan tersebut akan menjadi sumber tantangan baru yang terjadi pada suatu wilayah.

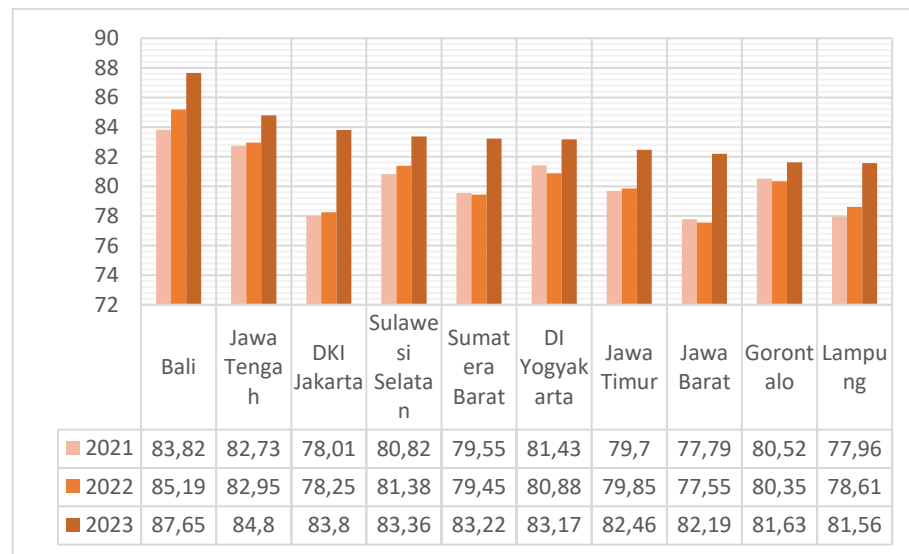
Tantangan utama dalam mencapai ketahanan pangan di suatu wilayah mencakup empat dimensi penting, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan, dan stabilitas. Pada aspek ketersediaan salah satu masalah yang dihadapi adalah produksi beras yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya sarana produksi seperti alat pertanian, benih, dan irigasi (Budiawati et al., 2024). Lahan pertanian berubah alih fungsi jadi pemukiman dan wilayah industri sehingga mengurangi luas lahan. Akibatnya, jumlah beras yang tersedia tidak mencukupi kebutuhan masyarakat dan daerah menjadi lebih bergantung pada pasokan dari luar.

Disisi lain, Menurut Andaresta (2024), harga beras yang cenderung tinggi dan tidak stabil disebabkan oleh permintaan beras yang terus meningkat, sementara produksinya tidak selalu mencukupi. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran ini menyebabkan harga beras menjadi tidak stabil, terutama saat musim panen berkurang atau distribusi terganggu. Kondisi ini memengaruhi stabilitas pangan, khususnya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang kesulitan membeli beras dalam jumlah cukup dan berkualitas. Jika hal

ini terus berlangsung, maka dapat mengganggu ketahanan pangan keluarga secara keseluruhan.

Selain itu, subsidi pupuk yang belum sepenuhnya merata menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap input pertanian, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Ketika subsidi tidak didistribusikan secara adil, petani mengalami kesulitan dalam mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau, sehingga biaya produksi meningkat dan hasil panen bisa menurun. Kondisi ini memengaruhi keterjangkauan pangan karena produksi yang rendah akan berdampak pada pasokan dan harga di pasar. Sementara itu, Curah hujan salah satu faktor iklim yang sangat menentukan dalam ketersediaan pangan, khususnya di daerah yang sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian. Pola hujan yang teratur dan sesuai musim akan mendukung proses produksi tanaman pangan, karena air menjadi kebutuhan utama dalam pertumbuhan padi, jagung, maupun komoditas lain yang menjadi sumber pangan pokok. Sebaliknya, jika terjadi ketidaksesuaian pola hujan baik berupa curah hujan yang terlalu tinggi hingga mengakibatkan banjir, maupun curah hujan yang terlalu rendah hingga menimbulkan kekeringan maka ketersediaan pangan dapat terganggu (Santoso et al., 2022).

**Gambar 1.1 Peringkat Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023**

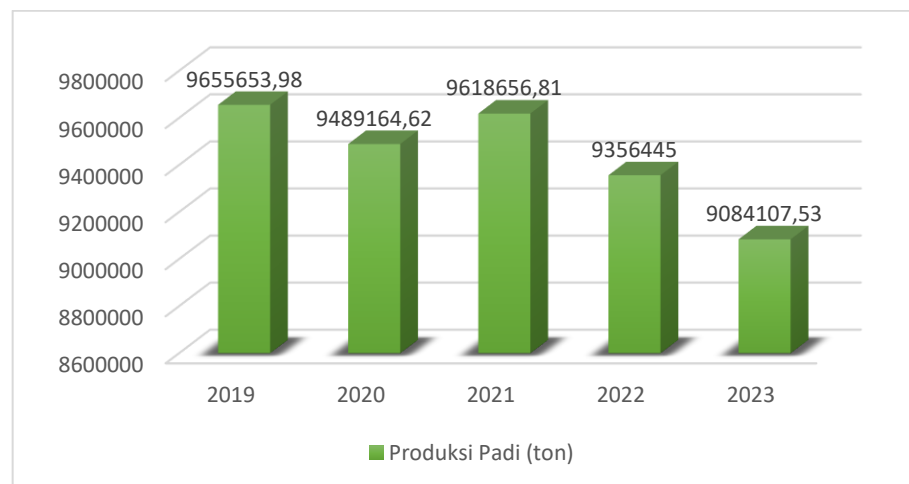


Sumber: Badan Pangan Nasional Indonesia, data diolah 2024

Berdasarkan data peringkat Indeks Ketahanan Pangan Provinsi tahun 2021-2023 menunjukkan perkembangan nilai indeks di sepuluh provinsi Indonesia yang mencerminkan tren kenaikan yang cukup konsisten terutama pada tahun 2023. Provinsi Bali menempati posisi teratas dengan nilai yang terus meningkat signifikan setiap tahun dari 83,82 pada 2021 menjadi 85,19 di 2022 dan meningkat ke 87,65 pada 2023. Kenaikan ini menegaskan bahwa Bali memiliki ketahanan pangan yang sangat baik, baik dari sisi ketersediaan, akses, maupun kualitas konsumsi masyarakatnya. Provinsi Jawa Tengah juga menunjukkan perkembangan yang stabil dengan tren kenaikan setiap tahunnya tercatat sebesar dari 82,73 tahun 2021 ke 82,95 tahun 2022, dan meningkat lebih tinggi sebesar 84,8 pada tahun 2023. Peningkatan yang konsisten ini menempatkan Provinsi Jawa Tengah pada posisi kedua tertinggi secara nasional setelah Bali. Hal tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki kontribusi besar dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia. Posisi ini juga menggambarkan keberhasilan Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga produksi pangan, memperluas akses masyarakat terhadap

bahan pangan pokok, serta memperbaiki kualitas konsumsi rumah tangga. Dengan capaian tersebut, Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi salah satu provinsi rujukan dalam pengelolaan ketahanan pangan yang berkelanjutan di tingkat nasional.

**Gambar 1.2 Produksi Padi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023**

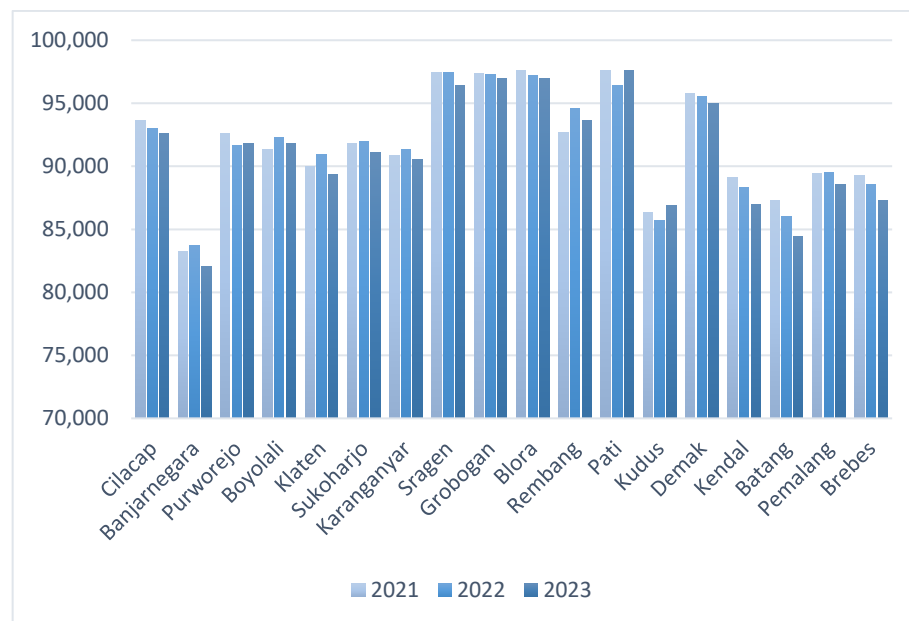


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah 2024

Produksi Padi Provinsi Jawa Tengah 2019-2023 memperlihatkan adanya fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, produksi padi mencapai 9.655.653,98 ton, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 9.489.164,62 ton. Selanjutnya, produksi kembali meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 9.618.656,81 ton, yang menjadi salah satu capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, tren penurunan kembali terjadi pada tahun 2022 dengan total produksi sebesar 9.356.445 ton, dan berlanjut hingga tahun 2023 yang hanya menghasilkan 9.084.107,53 ton. Pola fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung padi nasional, ketidakstabilan produksi dari tahun ke tahun mengindikasikan adanya pengaruh faktor eksternal seperti curah hujan, ketersediaan pupuk, maupun alih fungsi lahan yang berdampak pada ketersediaan pangan di wilayah ini.

Provinsi Jawa Tengah menjadi pilihan strategis karena sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan kontribusi produksi padi yang konsisten tinggi (Maresti Kartikowati, 2023). Provinsi Jawa Tengah menempati posisi ketiga sebagai penghasil beras terbesar di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun, dari sisi ketahanan pangan provinsi ini justru menempati urutan kedua secara nasional setelah Bali yang menunjukkan adanya keseimbangan relatif antara produksi, distribusi, dan akses pangan. Kondisi ini menjadikan Jawa Tengah menarik untuk diteliti karena terdapat dinamika antara tingginya potensi produksi dengan tantangan yang dihadapi seperti fluktuasi curah hujan, keterbatasan distribusi pupuk bersubsidi, serta tekanan alih fungsi lahan. Selain itu, jumlah penduduk Jawa Tengah yang besar juga menuntut ketersediaan pangan yang stabil agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan latar belakang tersebut, Jawa Tengah menjadi representasi penting dalam memahami bagaimana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan berpengaruh terhadap ketersediaan dan ketahanan pangan di tingkat provinsi maupun nasional.

**Gambar 1.3 Indeks Ketersediaan Pangan (IKP) Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023**



Sumber: Badan Pangan Nasional Indonesia, data diolah 2024

Berdasarkan data Indeks Ketersediaan Pangan (IKP) kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023 menunjukkan terjadi fluktuasi nilai antarwilayah. Pada tahun 2021, indeks tertinggi dicatat oleh Kabupaten Blora dengan nilai 97,63, diikuti Grobogan 97,38, Pati 97,59, serta Sragen 97,42 yang menunjukkan kondisi ketersediaan pangan relatif sangat baik. Kabupaten dengan indeks menengah antara lain Sukoharjo 91,84, Boyolali 91,32, dan Purworejo 92,60. Sementara itu, Banjarnegara menjadi daerah dengan capaian terendah yakni 83,22, yang menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan pangan dibanding kabupaten lain. Pada tahun 2022, sebagian kabupaten mempertahankan skor tinggi seperti Sragen dengan 97,44, Pati 96,43, dan Blora 97,21. Namun, beberapa wilayah mengalami penurunan, misalnya Cilacap turun dari 93,67 menjadi 93,02 dan Purworejo dari 92,60 menjadi 91,68. Kabupaten Rembang justru menunjukkan kenaikan signifikan dari 92,65 menjadi 94,56. Di sisi lain, Banjarnegara tetap menjadi yang terendah dengan 83,75 meskipun terdapat sedikit peningkatan.



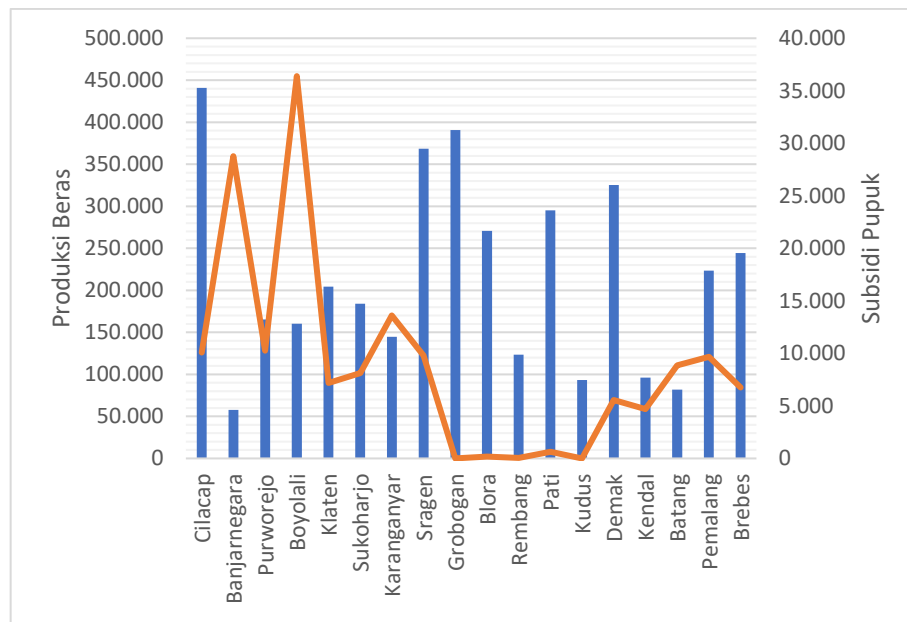
Pada tahun 2023, kondisi ketersediaan pangan di sebagian besar kabupaten menunjukkan stabilitas meskipun cenderung turun tipis. Sragen tetap unggul dengan capaian 96,41, disusul Grobogan 96,98 dan Blora 97,00. Kabupaten Pati yang semula stabil justru turun tipis ke 97,56, sedangkan Kudus mengalami kenaikan dari 85,68 ke 86,91. Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, dan Brebes mencatatkan tren penurunan berturut-turut menjadi 92,57, 82,06, dan 87,29, yang menandakan adanya kerentanan dibanding kabupaten lain.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terjadi ketimpangan antarwilayah dalam ketersediaan pangan. Kabupaten dengan indeks tinggi seperti Sragen, Blora, Grobogan, dan Pati mampu mempertahankan ketersediaan pangan yang baik karena ditopang oleh produksi padi yang relatif stabil serta luas areal panen yang besar. Sebaliknya, wilayah dengan capaian lebih rendah seperti Banjarnegara, Brebes, dan sebagian daerah menunjukkan kerentanan yang meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor geografis dan fluktuasi curah hujan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi, rendahnya produktivitas lahan, dan tekanan alih fungsi lahan ke non-pertanian (Nubun & Yuliawati, 2022). Sementara itu, kabupaten dengan nilai menengah seperti Cilacap, Kendal, dan Boyolali menunjukkan kondisi relatif stabil, namun tetap berpotensi menghadapi kerawanan apabila terjadi gangguan distribusi pangan atau lonjakan harga.

Ketahanan pangan yang berkelanjutan dan terintegrasi di Jawa Tengah harus mencakup keseluruhan sistem pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga akses dan konsumsi. Dalam konteks ini, pembangunan sektor pertanian menjadi faktor strategis dalam menjamin ketersediaan pangan yang merata bagi seluruh

masyarakat (Ekawati & Rahmah, 2024). Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik konsumsi pangan yang sangat didominasi oleh beras mencapai 88,6%. Ketergantungan yang sangat tinggi terhadap beras menjadikan komoditas ini bukan hanya sebagai sumber energi utama, tetapi juga sebagai komponen strategis dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Beras memiliki peran ganda, yakni sebagai bahan pangan pokok sekaligus sebagai indikator kesejahteraan, karena setiap fluktuasi dalam ketersediaan maupun harga beras akan langsung mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga, stabilitas ekonomi, dan ketahanan pangan di tingkat daerah. Selain itu, sebagai salah satu lumbung padi nasional Jawa Tengah tidak hanya memproduksi beras untuk konsumsi internal, tetapi juga berkontribusi terhadap suplai pangan di tingkat nasional. Oleh karena itu, analisis produksi beras sangat relevan dan strategis untuk menilai sejauh mana ketersediaan pangan dapat terjamin, baik dalam menghadapi tantangan iklim, fluktuasi harga, maupun perubahan permintaan yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.

**Gambar 1.4 Produksi Beras dan Subsidi Pupuk Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah 2024

Berdasarkan data produksi beras dan subsidi pupuk di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antar kabupaten di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap memiliki produksi beras tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2023 yaitu 441.026 ton dengan subsidi pupuk sebesar 10.074 ton yang memperlihatkan bahwa produksi tetap kuat meski subsidi tidak terlalu besar. Kabupaten Banjarnegara dengan produksinya yang rendah sebesar 57.746 ton, namun menerima subsidi pupuk yang cukup besar mencapai 28.767 ton, sehingga terlihat sangat bergantung pada dukungan subsidi. Kabupaten Purworejo memproduksi sebesar 165.446 ton produksi beras dengan subsidi 10.258 ton, hal tersebut menandakan adanya keseimbangan antara output dan dukungan pupuk. Kabupaten Boyolali menghasilkan 160.417 ton produksi beras, tetapi mendapatkan subsidi paling tinggi di antara kabupaten lain sebesar 36.393 ton, menunjukkan bahwa prioritas distribusi subsidi pupuk yang tinggi di wilayah ini. Kabupaten Klaten dengan produksi beras sebesar 204.558 ton hanya menerima subsidi pupuk

sebesar 7.186 ton, sementara Kabupaten Sukoharjo yang menghasilkan 184.146 ton mendapat 8.134 ton subsidi sehingga keduanya menunjukkan produktivitas cukup baik meskipun subsidi rendah. Kabupaten Karanganyar mencatat produksi sebesar 144.809 ton dengan subsidi 13.608 ton yang relatif lebih besar dibanding daerah dengan produksi sama. Kabupaten Sragen sebagai salah satu sentra pangan menghasilkan 368.648 ton dengan subsidi 9.797 ton, sama dengan Kabupaten Grobogan yang bahkan lebih tinggi 390.691 ton tetapi hanya menerima 3 ton subsidi. Kabupaten Blora dengan 270.784 ton juga mendapat subsidi sangat kecil hanya 184 ton, sama halnya dengan Kabupaten Rembang yang produksinya 123.614 ton tetapi subsidinya hanya 45 ton. Kabupaten Pati mampu menghasilkan 295.193 ton dengan subsidi 639 ton, sedangkan Kabupaten Kudus yang hanya 93.289 ton menerima subsidi 10 ton saja. Kabupaten Demak yang juga sentra pangan mencatat produksi 325.487 ton dengan subsidi 5.558 ton, sedangkan Kabupaten Kendal memproduksi 96.079 ton dengan subsidi 4.699 ton. Kabupaten Batang yang produksinya 81.743 ton mendapat subsidi cukup besar 8.871 ton, sedangkan Kabupaten Pemalang dengan produksi 223.551 ton memperoleh 9.673 ton subsidi. Terakhir, Kabupaten Brebes menghasilkan 244.289 ton dengan subsidi pupuk 6.755 ton.

Produksi beras di Jawa Tengah menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah. Beberapa kabupaten menjadi sentra utama mampu mempertahankan produktivitas tinggi, seperti Grobogan, Sragen, Pati, dan Demak, sehingga berperan besar dalam menjaga ketersediaan pangan. Sebaliknya, ada kabupaten dengan produksi rendah seperti Banjarnegara, Kudus, Kendal, dan Batang yang masih bergantung pada pasokan dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan. Perbedaan tersebut erat kaitannya dengan faktor daya dukung lahan, ketersediaan

air, kualitas benih, serta penerapan teknologi pertanian yang belum merata (Arief Hartono, 2024). Selain itu, kondisi geografis dan infrastruktur pertanian juga sangat memengaruhi kontribusi suatu wilayah terhadap total produksi beras di provinsi ini.

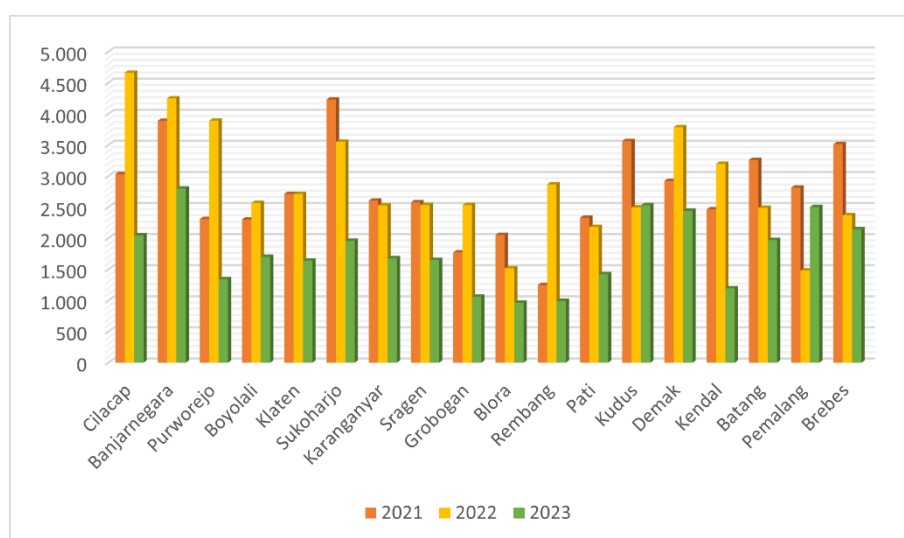
Dari sisi subsidi pupuk, pola distribusi juga memperlihatkan ketidakmerataan. Ada wilayah yang menerima subsidi besar meskipun produksinya relatif rendah, sementara sentra pangan justru memperoleh subsidi terbatas. Ketidaksesuaian distribusi pupuk berisiko memperburuk ketimpangan karena petani di daerah dengan subsidi rendah harus membeli pupuk nonsubsidi dengan harga tinggi (Ajina et al., 2023). Hal ini menandakan bahwa alokasi subsidi tidak hanya didasarkan pada capaian produksi, tetapi juga dipengaruhi faktor lain seperti prioritas pembangunan daerah, akses petani terhadap program subsidi, dan kebutuhan intervensi pemerintah untuk menjaga keberlanjutan usaha tani di daerah rentan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara produksi dan subsidi dapat memengaruhi efisiensi usaha tani. Pemerintah berusaha menyalurkan subsidi lebih merata agar manfaatnya dirasakan oleh daerah yang masih tertinggal produktivitasnya. Wilayah dengan produksi tinggi seperti Cilacap, Sragen, dan Grobogan tetap produktif meskipun subsidi rendah karena ditopang luas lahan, irigasi yang memadai, serta kemampuan petani membeli pupuk nonsubsidi. Sebaliknya, wilayah dengan subsidi besar tetapi produksi rendah seperti Banjarnegara dan Boyolali menjadi prioritas penerima subsidi untuk menjaga keberlangsungan produksi pangan (Sembiring et al., 2020).

Dalam hal ini, pupuk bersubsidi menjadi indikator utama untuk menjaga produktivitas pertanian. Subsidi mampu menekan biaya produksi bagi petani kecil serta mendukung keberlanjutan produksi beras (Krisna et al., 2022).

Namun, permasalahan distribusi yang tidak merata, keterbatasan jumlah pupuk, serta ketidaktepatan sasaran seringkali menimbulkan kendala. Faktor lain seperti curah hujan juga sangat berpengaruh, di mana hujan teratur mendukung pertumbuhan tanaman, sementara curah hujan ekstrem menyebabkan banjir atau kekeringan yang mengancam hasil panen. Tantangan perubahan iklim membuat pengelolaan risiko iklim menjadi aspek penting dalam strategi peningkatan produksi.

**Gambar 1.5 Curah Hujan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023**



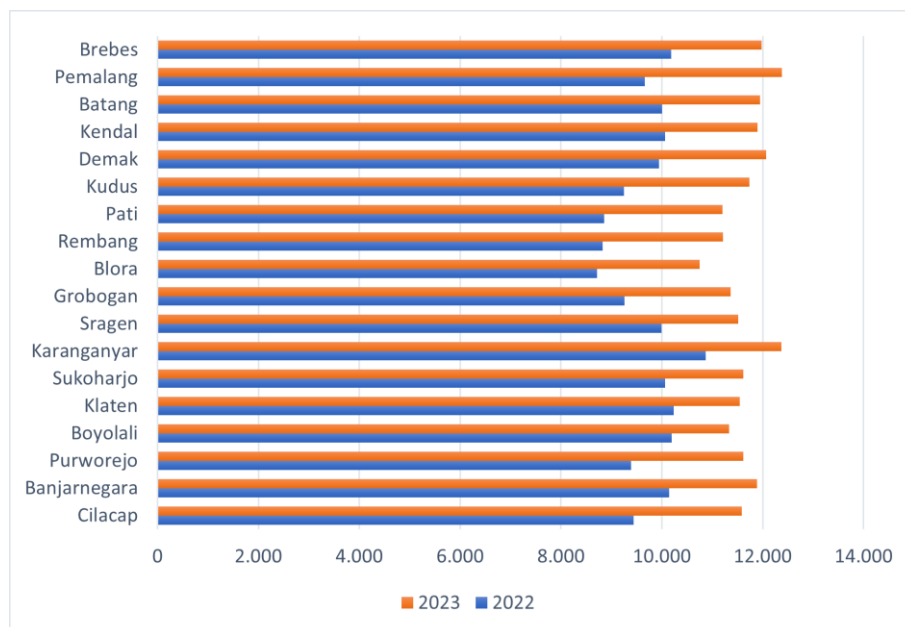
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, data diolah 2024

Berdasarkan Data Curah Hujan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021-2023, menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, curah hujan di beberapa daerah tercatat cukup tinggi, Kebumen 4.929 mm, Banjarnegara 3.887 mm, dan Cilacap 3.033 mm, sementara daerah lain seperti Grobogan 1.773 mm, Rembang 1.248 mm, dan Blora 2.053 mm relatif lebih rendah. Memasuki tahun 2022, hampir semua wilayah mengalami peningkatan signifikan, seperti Cilacap yang naik menjadi 4.661 mm, Semarang 4.555 mm, dan Banyumas 4.161 mm, sebelum kemudian menurun tajam pada 2023, misalnya Cilacap turun ke 2.047 mm, Banyumas 1.708 mm, dan Purworejo 1.343 mm. Meski demikian,

terdapat pengecualian di beberapa wilayah seperti Jepara yang justru naik pada 2023 menjadi 3.107 mm, dan Kudus yang meningkat menjadi 2.532 mm. Pola ini mengindikasikan bahwa curah hujan di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh dinamika iklim global, di mana fenomena La Niña pada 2022 menyebabkan peningkatan intensitas hujan, sedangkan El Niño pada 2023 berdampak pada penurunan curah hujan di sebagian besar wilayah dengan variasi lokal yang dipengaruhi oleh kondisi geografis dan topografi masing-masing daerah (Harahap et al., 2023).

Fluktuasi curah hujan tersebut memiliki dampak langsung terhadap ketahanan pangan karena ketersediaan air menjadi faktor penentu produktivitas pertanian. Pada saat curah hujan terlalu tinggi air memang tersedia melimpah, tetapi risiko banjir dan serangan hama dapat menurunkan hasil panen. Sebaliknya, curah hujan yang terlalu rendah akan menimbulkan kekeringan dan mengurangi produktivitas tanaman pangan (Surmaini & Faqih, 2016). Dengan demikian, perubahan pola curah hujan di Jawa Tengah menunjukkan kerentanan terhadap ketersediaan pangan sehingga diperlukan strategi adaptasi, baik melalui pengaturan irigasi, pola tanam, maupun pemilihan varietas tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi iklim ekstrem.

**Gambar 1.6 Harga Beras Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023**



Sumber: Sistem Informasi Harga dan Produk Komiditi, data diolah 2024

Berdasarkan Data Harga Beras di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022-2023, menunjukkan menunjukkan kenaikan harga tanpa terkecuali. Pada tahun 2022, harga terendah tercatat di Kabupaten Blora sebesar Rp8.719/kg, diikuti Rembang sebesar Rp8.825/kg, serta Pati sebesar Rp8.858/kg. Harga di bawah Rp9.500/kg juga terlihat di Kudus Rp9.248 dan Grobogan Rp9.259. Sebaliknya, harga tertinggi berada di Karanganyar sebesar Rp10.874/kg, disusul Boyolali Rp10.199, Klaten Rp10.238, serta Banjarnegara Rp10.144. Memasuki tahun 2023, harga beras di semua kabupaten meningkat cukup signifikan. Pemalang mencatat harga tertinggi sebesar Rp12.380/kg, diikuti Karanganyar Rp12.365, Demak Rp12.063, Kendal Rp11.892, Batang Rp11.946, dan Brebes Rp11.978. Sementara itu, harga menengah banyak ditemukan di Klaten Rp11.546, Sukoharjo Rp11.612, Purworejo Rp11.610, hingga Sragen Rp11.510. Harga terendah tahun 2023 tercatat di Blora Rp10.744/kg, Pati Rp11.203, serta Rembang Rp11.209. Kenaikan paling menonjol terlihat di Pemalang yang naik dari Rp9.659 menjadi Rp12.380, Demak dari Rp9.948 menjadi Rp12.063, serta Karanganyar dari Rp10.874 menjadi



Rp12.365. Rata-rata kenaikan harga berada pada rentang Rp1.500–Rp2.700/kg dibandingkan tahun sebelumnya.

Fenomena kenaikan harga beras yang merata ini mencerminkan adanya tekanan harga secara luas di tingkat konsumen, tidak hanya di wilayah dengan produksi rendah, melainkan juga di sentra produksi seperti Karanganyar dan Boyolali. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tingginya jumlah produksi tidak serta-merta menjamin harga murah, karena faktor distribusi, rantai pasok, dan permintaan lokal sangat menentukan. Kenaikan harga beras yang tidak diimbangi dengan peningkatan daya beli masyarakat dapat menurunkan tingkat konsumsi pangan pokok khususnya di wilayah pedesaan (Aldon et al., 2023). Selain itu, harga beras yang tinggi secara akan memperburuk akses ketahanan pangan karena rumah tangga miskin cenderung mengurangi jumlah atau kualitas konsumsi pangan saat menghadapi inflasi bahan pangan pokok. Harga beras yang tinggi tidak terjadi di daerah dengan produksi rendah, tetapi juga di sentra produksi seperti Karanganyar dan Wonogiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah produksi yang besar tidak menjamin harga yang murah, akan tetapi faktor distribusi, jaringan pasar, dan permintaan lokal juga mempengaruhi harga beras di tingkat wilayah. Oleh karena itu, stabilisasi harga dan pemerataan distribusi menjadi penting dalam merespons gejolak harga pangan. Jika tidak ada intervensi yang memadai dari pemerintah daerah maupun pusat, maka kenaikan harga beras secara konsisten berpotensi memperbesar ketimpangan dan meningkatkan kerentanan pangan, terutama di wilayah yang juga mengalami penurunan produksi dan rendahnya daya beli masyarakat.

Pembedaan wilayah berdasarkan sektor unggulan pertanian menjadi langkah penting untuk memahami variasi faktor-faktor yang memengaruhi

ketahanan pangan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan variabel dummy untuk mengklasifikasikan kabupaten di Jawa Tengah ke dalam kelompok sentra produksi beras. Kabupaten dikategorikan dengan sektor unggulan pertanian ditandai dengan nilai 1, sementara sebagian lainnya tidak termasuk dalam kategori tersebut ditandai dengan nilai 0. Kabupaten seperti Cilacap, Purworejo, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Demak, dan Kendal memiliki nilai 1, artinya daerah tersebut merupakan sentra produksi beras utama di provinsi ini. Sementara itu, kabupaten seperti Banjarnegara, Sukoharjo, Kudus, Batang, Pemalang, dan Brebes dengan nilai 0, artinya daerah tersebut tidak dikategorikan sebagai sektor unggulan pertanian. Meskipun beberapa dari wilayah ini tetap memiliki aktivitas pertanian, namun kontribusinya terhadap total produksi beras relatif kecil dibandingkan dengan daerah yang masuk kategori dummy 1. Dengan demikian, penggunaan variabel dummy ini memudahkan dalam pemisahan wilayah berdasarkan kapasitas produksinya dalam analisis regresi, terutama saat menguji pengaruh karakteristik wilayah penghasil beras terhadap variabel-variabel ketahanan pangan atau faktor lainnya yang relevan dalam penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketahanan pangan, khususnya dari aspek ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi dasar bagi perumusan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan ketahanan pangan baik melalui peningkatan produktivitas pertanian, efisiensi distribusi, maupun intervensi sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menyusun penelitian dengan

judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketersediaan Pangan di Provinsi Jawa Tengah”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Produksi Beras mempengaruhi ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana Subsidi Pupuk mempengaruhi ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana Curah Hujan mempengaruhi ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana Harga Beras mempengaruhi ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah?
5. Bagaimana Dummy Daerah Penghasil Beras Utama mempengaruhi ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis pengaruh Produksi Beras terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh Subsidi Pupuk terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh Curah Hujan terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh Harga Beras terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah.
5. Menganalisis pengaruh Dummy Daerah Penghasil Beras Utama terhadap ketersediaan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada empat variabel utama yaitu produksi beras, subsidi pupuk, curah hujan, dan harga beras. Analisis ini mencakup semua kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 18 wilayah selama periode tahun 2019-2023. Data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bappanas) dan Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHaTi) menjadi sumber utama, sementara pendekatan yang diterapkan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis data panel untuk melihat dinamika ketahanan pangan secara lintas wilayah dan waktu. Dengan batasan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai ketahanan pangan di tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **Bagi Akademisi**

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi pertanian dan ketahanan pangan, khususnya melalui penggunaan analisis data panel dan variabel dummy daerah penghasil beras utama. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji faktor-faktor ketahanan pangan dengan pendekatan serupa atau menambahkan variabel lain seperti aspek akses dan pemanfaatan pangan, serta menjadi bahan ajar atau literatur pendukung dalam penelitian empiris terkait kebijakan pangan dan pembangunan wilayah.

**Bagi Pemerintah**

Penelitian ini memberikan informasi berbasis data yang dapat membantu pemerintah pusat maupun daerah dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan lebih fokus ke tujuan. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas subsidi pupuk, mengendalikan harga pangan pokok, dan menyusun strategi peningkatan produksi beras serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim yang memengaruhi curah hujan. Dengan demikian, pemerintah dapat lebih responsif dalam menyusun kebijakan yang adaptif terhadap kondisi lokal masing-masing kabupaten.

**Bagi Masyarakat**

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketersediaan pangan sehingga masyarakat memahami pentingnya peran produksi, harga beras, curah hujan, serta subsidi dalam menjaga ketahanan pangan. Penelitian ini juga diharapkan mendorong kesadaran petani dan masyarakat lokal untuk lebih adaptif terhadap perubahan iklim maupun fluktuasi harga dengan cara mengatur pola tanam, memilih varietas unggul, serta memanfaatkan teknologi pertanian. Secara tidak langsung, hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada terciptanya stabilitas harga pangan sehingga masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah, tetap memiliki akses terhadap pangan pokok yang cukup dan bergizi.